

Model Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Menghadapi Perubahan Sosial di Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat

Krisnawati

Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Papua, Kabupaten Manokwari, Indonesia



Email Korespondensi: wati.cytina@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 09-02-2026

Disetujui 19-02-2026

Diterbitkan 21-02-2026

ABSTRACT

This paper aims to construct a model of indigenous community empowerment in responding to social change in the Arfak Mountains. Social transformation driven by development expansion, market economic integration, and shifts in values and social relations has affected local livelihoods, customary institutional structures, and cultural practices. This research employs a qualitative approach using ethnographic methods to gain an in-depth understanding of lived experiences, symbolic meanings, and community adaptation strategies in navigating these dynamics. Data were collected through participant observation, in-depth interviews with customary leaders, women, and youth, as well as the review of local documents. The data were analyzed interpretatively through processes of reduction, categorization, and meaning-making. The findings indicate that effective empowerment is contextual, participatory, and rooted in local wisdom. The proposed model emphasizes strengthening customary institutions, community-based resource management, sustainable local economic development, and the creation of dialogue spaces between customary actors and government. Empowerment is understood not merely as economic capacity building, but as a collective process that reinforces cultural identity, social solidarity, and community resilience to change. This study offers an ethnography-based empowerment framework that is sensitive to the values and social structures of indigenous communities in the Arfak Mountains.

Keyword: Community Development, Social Change, Local Wisdom

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Krisnawati, K. (2026). Model Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Menghadapi Perubahan Sosial di Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat. *Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 111-119. <https://doi.org/10.63822/s09h1988>

PENDAHULUAN

Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat merupakan wilayah yang dihuni oleh komunitas masyarakat adat suku Arfak dengan sistem sosial, budaya, dan kelembagaan tradisional yang masih kuat (Krisnawati, Raya & Subejo, 2025). Wilayah ini mengalami dinamika perubahan sosial yang dipicu oleh ekspansi pembangunan infrastruktur, penetrasi ekonomi pasar, serta meningkatnya interaksi dengan aktor-aktor eksternal (Nofianti, 2020).. Perubahan tersebut membawa implikasi terhadap sistem penghidupan, pola relasi sosial, serta keberlanjutan praktik-praktik budaya lokal. Secara teoritis, perubahan sosial dipahami sebagai proses transformasi dalam struktur dan fungsi masyarakat yang dapat berlangsung secara gradual maupun cepat (Giddens & Sutton, 2009). Dalam konteks masyarakat adat, proses ini sering kali bersifat ambivalen karena menghadirkan peluang sekaligus tantangan terhadap keberlanjutan identitas kolektif.

Di tengah arus transformasi tersebut, pemberdayaan masyarakat menjadi pendekatan strategis untuk memperkuat kapasitas komunitas dalam mengelola perubahan secara mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan akses ekonomi, tetapi juga sebagai proses penguatan kontrol masyarakat atas sumber daya, keputusan, dan arah pembangunan (Chambers, 1995). Lebih lanjut, pendekatan pembangunan partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar selaras dengan kebutuhan serta nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut (Ife & Tesoriero, 2008). Dalam konteks masyarakat adat di Kabupaten Pegunungan Arfak, pemberdayaan perlu mempertimbangkan struktur kelembagaan adat dan norma budaya sebagai fondasi sosial yang telah lama menopang kohesi komunitas Arfak.

Kearifan lokal menjadi elemen sentral dalam merespons perubahan sosial. Pengetahuan lokal mengenai pengelolaan sumber daya alam, tata ruang adat, serta mekanisme musyawarah merupakan bentuk modal sosial yang berkontribusi pada ketahanan masyarakat (Wirata, 2025). Konsep local wisdom dipahami sebagai sistem nilai dan praktik yang berkembang melalui pengalaman historis masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungannya (Geertz, 2000). Studi pembangunan berbasis komunitas, integrasi antara kearifan lokal dan pendekatan modern terbukti mampu menghasilkan model yang lebih adaptif dan berkelanjutan (Pretty, 2008). Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat adat di Pegunungan Arfak tidak dapat dilepaskan dari penguatan nilai-nilai lokal yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun.

Igya Ser Hanjob merupakan kearifan lokal yang hidup dalam sistem sosial masyarakat adat Arfak di Pegunungan Arfak, Papua Barat. Secara filosofis, istilah ini berarti “berdiri dan menjaga batas”, yang merefleksikan prinsip pengaturan ruang, pemanfaatan sumber daya alam, serta tata kehidupan komunitas secara berkelanjutan. Implementasinya diwujudkan melalui pembagian wilayah adat ke dalam empat zona utama, yakni Bahamti, Nimahamti, Susti, dan Situmti. Pembagian zonasi tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengendalian ekologis dan sosial untuk menjaga keseimbangan lingkungan, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mengantisipasi risiko krisis pangan dalam kehidupan masyarakat (Purbokurniawan et al., 2019). Walaupun dinamika modernisasi dan pembangunan infrastruktur jalan mulai memengaruhi pola kehidupan masyarakat, *Igya Ser Hanjob* tetap berfungsi sebagai landasan etis dan normatif bagi komunitas Arfak dalam mengelola serta berinteraksi dengan lingkungan alamnya (Ataribaba et al., 2020).

Kearifan lokal *igy ser hanjob* menjadi elemen sentral dalam merespons perubahan sosial. Pengetahuan lokal mengenai pengelolaan sumber daya alam, tata ruang adat, serta mekanisme musyawarah merupakan bentuk modal sosial yang berkontribusi pada ketahanan komunitas (Toansiba et al., 2021). Konsep *local wisdom* dipahami sebagai sistem nilai dan praktik yang berkembang melalui pengalaman

historis masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungannya (Geertz, 2000). Dalam banyak studi pembangunan berbasis komunitas, integrasi antara kearifan lokal dan pendekatan modern terbukti mampu menghasilkan model yang lebih adaptif dan berkelanjutan (Pretty, 2008). Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat adat di Pegunungan Arfak tidak dapat dilepaskan dari penguatan nilai-nilai lokal yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun

Meskipun berbagai program pembangunan telah dijalankan di wilayah ini, sebagian di antaranya masih berorientasi *top-down* dan kurang sensitif terhadap struktur sosial serta sistem nilai masyarakat adat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan partisipasi, melemahnya institusi adat, dan erosi identitas budaya (Muammar, 2024). Kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik sosial lokal menunjukkan perlunya model pemberdayaan yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis etnografi. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap pengalaman hidup, makna simbolik, dan strategi adaptasi masyarakat Arfak dalam menghadapi perubahan sosial (Tri Fitriani Puspitasari et al., 2025).

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian tentang pemberdayaan masyarakat adat dengan menawarkan kerangka model berbasis temuan etnografis yang sensitif terhadap nilai, struktur sosial, dan dinamika lokal. Secara praktis, model yang dirumuskan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, maupun aktor pembangunan lainnya dalam merancang program yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Kontribusi ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan material, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan solidaritas sosial masyarakat adat.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengonstruksi model pemberdayaan masyarakat adat dalam menghadapi perubahan sosial di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Model yang dirumuskan diharapkan mampu mengintegrasikan penguatan institusi adat, pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan, serta penciptaan ruang dialog antara masyarakat adat dan pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghadirkan kerangka pemberdayaan yang tidak hanya responsif terhadap dinamika perubahan, tetapi juga berakar pada kearifan lokal dan aspirasi masyarakat adat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, yang merupakan wilayah masyarakat adat suku Arfak dengan struktur kelembagaan tradisional yang masih berfungsi aktif dalam tata kelola sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif berbasis etnografi, yang mengintegrasikan proses penelitian kualitatif dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan terbangunnya pemahaman kontekstual terhadap dinamika sosial sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam merumuskan solusi atas persoalan yang mereka hadapi (Chambers, 1995; Creswell, 2014).

Tahap Persiapan dan Pemetaan Sosial

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui pemetaan sosial (*social mapping*) untuk mengidentifikasi struktur kelembagaan adat, aktor kunci, potensi sumber daya lokal, serta bentuk-bentuk perubahan sosial yang sedang berlangsung. Pemetaan ini dilakukan melalui observasi partisipatif dan dialog awal dengan tokoh adat, aparat kampung, kelompok perempuan, dan pemuda. Tahap ini bertujuan membangun

kepercayaan (*trust building*) sekaligus memastikan bahwa kegiatan pengabdian disusun berdasarkan kebutuhan *riil* masyarakat.

Hasil pemetaan menjadi dasar dalam menyusun desain kegiatan pemberdayaan, termasuk penyusunan materi diskusi, rancangan forum kelompok terarah (FGD), dan penyusunan draft awal model pemberdayaan berbasis masyarakat.

Tahap Pelaksanaan: Pendekatan Partisipatif dan Reflektif

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu:

(a) *Focus Group Discussion* (FGD) Tematik

FGD dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan unsur adat, perempuan, dan generasi muda. Diskusi difokuskan pada isu perubahan sosial, tantangan terhadap kelembagaan adat, serta strategi adaptasi yang telah dilakukan komunitas. FGD ini tidak hanya berfungsi sebagai teknik pengumpulan data, tetapi juga sebagai ruang refleksi kolektif untuk memperkuat kesadaran kritis masyarakat terhadap posisi dan perannya dalam pembangunan.

(b) Pelatihan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Adat

Kegiatan ini berbentuk lokakarya singkat yang membahas tata kelola kelembagaan adat, pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, serta strategi membangun dialog dengan pemerintah daerah. Materi pelatihan disusun berdasarkan hasil pemetaan sosial dan diskusi awal, sehingga bersifat kontekstual dan relevan dengan kondisi lokal. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas organisasi lokal dan kepemimpinan masyarakat adat Arfak dalam menghadapi dinamika perubahan sosial.

(c) Penyusunan Modul dan Draft Model Pemberdayaan

Sebagai luaran konkret kegiatan, disusun modul sederhana tentang prinsip-prinsip pemberdayaan berbasis kearifan lokal yang dapat digunakan oleh komunitas maupun pemerintah kampung. Selain itu, dirumuskan draft model pemberdayaan masyarakat adat Arfak yang memuat komponen penguatan institusi adat, pengelolaan sumber daya komunitas, pengembangan ekonomi lokal berkelanjutan, dan mekanisme dialog multipihak.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, FGD, studi dokumentasi serta hasil penelitian peneliti. Observasi partisipatif dilakukan dengan terlibat dalam aktivitas sosial dan musyawarah adat guna memahami pola interaksi dan proses pengambilan keputusan (Spradley, 1980). Wawancara mendalam dilakukan secara semi terstruktur untuk menggali pengalaman, persepsi, serta strategi adaptasi masyarakat terhadap perubahan sosial.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan (Miles et al., 2014). Temuan lapangan dikategorikan ke dalam tema-tema utama seperti penguatan kelembagaan adat, ketahanan ekonomi lokal, dan relasi pemerintah–masyarakat adat. Proses analisis tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga reflektif, karena hasil sementara dipresentasikan kembali dalam forum komunitas untuk memperoleh masukan (*member checking*).

Evaluasi dan Keberlanjutan Program

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui diskusi evaluatif bersama masyarakat adat Arfak untuk menilai relevansi materi, tingkat partisipasi, serta potensi keberlanjutan program. Indikator evaluasi meliputi: (1) meningkatnya pemahaman masyarakat tentang konsep pemberdayaan berbasis adat; (2) terbentuknya

komitmen bersama untuk memperkuat institusi adat dan (3) tersusunnya draft model dan modul pemberdayaan yang dapat direplikasi.

Bentuk keberlanjutan, hasil kegiatan direkomendasikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Arfak dan lembaga adat setempat sebagai rujukan dalam penyusunan program pembangunan kampung berbasis kearifan lokal *igya ser hanjob*. Dengan demikian, kegiatan ini tidak berhenti pada tahap perumusan konseptual, tetapi diarahkan pada implementasi nyata dalam tata kelola pembangunan lokal.

Prinsip Etika dan Partisipasi

Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan menjunjung prinsip persetujuan partisipan (informed consent), penghormatan terhadap norma adat, serta keterbukaan informasi. Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan, mulai dari identifikasi masalah hingga perumusan model. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek perubahan (Chambers, 1995).

Melalui metode tersebut, kegiatan pengabdian ini menghasilkan dua luaran utama: (1) model pemberdayaan masyarakat adat berbasis etnografi partisipatif, dan (2) modul penguatan kelembagaan adat suku Arfak yang aplikatif. Keduanya diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merancang program pembangunan yang kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan di Pegunungan Arfak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, model pemberdayaan masyarakat adat Arfak terdiri atas empat komponen utama: (1) Penguatan kelembagaan adat sebagai fondasi tata kelola sosial; (2) Pengelolaan sumber daya berbasis komunitas untuk menjaga keberlanjutan ekologis dan ekonomi lokal; (3) Pengembangan ekonomi lokal berkelanjutan berbasis potensi dan kearifan lokal, dan (4) Ruang dialog multipihak untuk memperkuat relasi pemerintah dan masyarakat adat.



Gambar 1. Model Pemberdayaan Masyarakat Adat Arfak dalam Menghadapi Perubahan Sosial di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat

Model ini bersifat kontekstual, partisipatif, dan reflektif. Pemberdayaan dipahami sebagai proses kolektif yang memperkuat identitas budaya, solidaritas sosial, serta ketahanan komunitas dalam menghadapi perubahan sosial.

Penguatan Kelembagaan Adat sebagai Basis Ketahanan Sosial

Hasil pemetaan sosial dan FGD menunjukkan bahwa kelembagaan adat masyarakat Arfak di Kabupaten Pegunungan Arfak masih berfungsi aktif dalam pengambilan keputusan kolektif, penyelesaian konflik, serta pengelolaan sumber daya berbasis kekerabatan. Namun, tekanan pembangunan, ekspansi ekonomi pasar, dan intervensi kebijakan formal telah menggeser sebagian otoritas adat dalam tata kelola sosial.

Melalui pelatihan penguatan kapasitas dan forum reflektif, terjadi peningkatan kesadaran kolektif mengenai pentingnya revitalisasi struktur adat sebagai fondasi pemberdayaan. Temuan ini sejalan dengan perspektif pemberdayaan partisipatif yang menempatkan institusi lokal sebagai aktor utama perubahan, bukan sekadar penerima program (Chambers, 1995). Pada konteks etnografi, kelembagaan adat tidak hanya dipahami sebagai struktur normatif, tetapi sebagai sistem makna yang membentuk identitas dan solidaritas sosial.

Secara konseptual, penguatan kelembagaan adat dalam model yang dirumuskan mencakup: (1) konsolidasi peran tokoh adat dalam musyawarah kampung; (2) dokumentasi aturan adat sebagai referensi tata kelola; dan (3) pembentukan mekanisme koordinasi dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, pemberdayaan diposisikan sebagai proses institusional yang memperkuat kapasitas kolektif komunitas dalam menghadapi perubahan sosial.

Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Komunitas dan Ketahanan Ekonomi Lokal

Temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat adat Arfak masih mengandalkan praktik pertanian tradisional, pemanfaatan hutan, dan sistem kerja kolektif sebagai basis ekonomi rumah tangga. Perubahan akses lahan, meningkatnya kebutuhan konsumsi tunai, serta penetrasi pasar memunculkan tantangan terhadap keberlanjutan ekonomi lokal.

Melalui diskusi partisipatif, masyarakat mengidentifikasi pentingnya penguatan sistem pengelolaan sumber daya berbasis komunitas yang mempertahankan prinsip keseimbangan ekologis dan solidaritas sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari dimensi kultural dan ekologis. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pembangunan berbasis aset lokal (asset-based development) yang menekankan penguatan potensi internal komunitas (Creswell, 2014).

Model pemberdayaan yang dihasilkan menempatkan ekonomi lokal berkelanjutan sebagai komponen kunci, dengan strategi: (1) diversifikasi usaha berbasis sumber daya lokal; (2) penguatan kelompok usaha komunitas; dan (3) pengembangan jejaring pemasaran yang tetap menghormati norma adat. Dengan demikian, transformasi ekonomi tidak dipahami sebagai komersialisasi semata, melainkan sebagai adaptasi selektif terhadap perubahan sosial.

Ruang Dialog Multipihak dan Transformasi Relasi Pemerintah Masyarakat Adat

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa selama ini relasi antara pemerintah kampung dan lembaga adat cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya dialogis. Forum FGD dan lokakarya yang dilaksanakan dalam kegiatan ini berfungsi sebagai ruang deliberatif yang mempertemukan perspektif adat dan pemerintah secara lebih setara.

Praktik ini memperkuat gagasan bahwa pemberdayaan merupakan proses negosiasi makna dan kekuasaan dalam struktur sosial (Chambers, 1995). Melalui mekanisme *member checking*, hasil sementara penelitian didiskusikan kembali dengan komunitas untuk memastikan akurasi dan legitimasi temuan (Miles et al., 2014). Pendekatan reflektif ini memperlihatkan bahwa produksi pengetahuan bersifat kolaboratif, bukan top-down.

Model yang dirumuskan menekankan pembentukan forum komunikasi rutin antara lembaga adat, pemerintah kampung, perempuan, dan pemuda sebagai ruang mediasi kepentingan. Strategi ini bertujuan mencegah marginalisasi aktor lokal dalam proses pembangunan sekaligus memperkuat kohesi sosial.

Pemberdayaan sebagai Proses Kultural dan Identitas Kolektif

Temuan penting lainnya adalah bahwa masyarakat Arfak memaknai pemberdayaan bukan hanya dalam kerangka peningkatan kapasitas ekonomi, tetapi sebagai penguatan jati diri dan solidaritas komunal. Nilai lokal seperti *igya ser hanjob* (prinsip menjaga keseimbangan dan keharmonisan) menjadi landasan etis dalam merespons perubahan sosial.

Dari perspektif etnografi, nilai tersebut merepresentasikan sistem simbolik yang mengarahkan praktik sosial dan relasi manusia dan alam. Dengan demikian, model pemberdayaan berbasis etnografi partisipatif menempatkan budaya sebagai pusat strategi pembangunan.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman kolektif mengenai konsep pemberdayaan berbasis adat serta komitmen untuk memperkuat institusi lokal. Luaran berupa modul dan draft model pemberdayaan dinilai relevan dan aplikatif oleh komunitas. Secara teoretis, temuan ini mempertegas bahwa keberhasilan pemberdayaan sangat ditentukan oleh sensitivitas terhadap struktur sosial dan nilai budaya setempat.

Temuan Empiris dan Diskusi

Temuan empiris menunjukkan bahwa masyarakat adat Arfak masih menempatkan kelembagaan adat sebagai pusat pengambilan keputusan kolektif, pengelolaan sumber daya, dan penyelesaian konflik, meskipun menghadapi tekanan modernisasi, ekspansi pasar, dan intervensi kebijakan formal. Praktik partisipatif melalui FGD, observasi, dan lokakarya memperlihatkan adanya kesadaran kritis untuk merevitalisasi peran tokoh adat, memperkuat ekonomi berbasis sumber daya lokal, serta membangun ruang dialog yang lebih setara dengan pemerintah kampung. Secara analitis, temuan ini menegaskan bahwa pemberdayaan tidak efektif bila bersifat *top-down*, melainkan harus berakar pada nilai budaya, solidaritas komunal, dan prinsip lokal seperti *igya ser hanjob* yang menekankan keseimbangan relasi manusia–alam. Dengan demikian, diskusi mengarah pada pemahaman bahwa pemberdayaan masyarakat adat merupakan proses kultural dan institusional yang simultan mengintegrasikan penguatan identitas, tata kelola partisipatif, dan ketahanan ekonomi sehingga mampu meningkatkan resiliensi komunitas dalam menghadapi perubahan sosial secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kegiatan partisipatif yang dilaksanakan di Kabupaten Pegunungan Arfak, dapat disimpulkan bahwa model pemberdayaan masyarakat adat yang efektif harus berakar pada konteks sosial-budaya lokal serta memperkuat kelembagaan adat sebagai fondasi tata kelola komunitas. Pemberdayaan tidak cukup dimaknai sebagai peningkatan kapasitas ekonomi semata, tetapi sebagai proses

kolektif yang mengintegrasikan penguatan identitas budaya, solidaritas sosial, pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, dan pembangunan ruang dialog yang setara antara masyarakat adat dan pemerintah. Pendekatan etnografi partisipatif terbukti mampu menghasilkan pemahaman yang kontekstual sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam merumuskan solusi atas perubahan sosial yang dihadapi. Dengan demikian, model yang dirumuskan bersifat kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan, serta relevan dijadikan rujukan dalam perencanaan pembangunan kampung berbasis kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ataribaba, Y., Setiawan, I., & Noor, T. I. (2020). Pola Pergeseran Nilai Kearifan Lokal Sistem Ladang Berpindah Pada Masyarakat Arfak. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 6(2), 812–827. <https://doi.org/10.25157/ma.v6i2.3570>
- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: whose reality counts? In *Environment and Urbanization* (Vol. 7, Number 1).
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Denzin, N.K. (1978) *The research act: a theoretical introduction to sociological methods*. 2nd edn. New York: McGraw-Hill.
- Geertz, Clifford. (2000). *Local knowledge : further essays in interpretive anthropology*. Basic Books.
- Giddens, Anthony., & Sutton, P. W. . (2009). *Sociology*. Polity.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008) *Community development: community-based alternatives in an age of globalization*. 3rd edn. Frenchs Forest: Pearson Education.
- Krisnawati, Raya, A. B., & Subejo. (2025). Indigenous Knowledge on Shifting Cultivation and Sustainable Agriculture. *Journal of Global Innovations in Agricultural Sciences*, 13(1), 169–179. <https://doi.org/10.22194/JGIAS/25.1519>
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Johnny, S. (2014). Qualitative Data Analysis. In *SAGE Publications* (Vol. 7, Number 1).
- Muammar. (2024). Indigenous-based Resistance: Rethinking the Barambang Katute Indigenous Community's Agrarian Conflict with the Government Through the Indigenous Religion Paradigm. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 8(2), 147–167. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.v8i2.3680>
- Nofianti, T. (2020.). Perubahan Sosial Komunitas Suku Arfak Kabupaten Pegunungan Arfak Papua Barat. *Agribusiness Journal*, 13(2), 95–107. doi: 10.15408/aj.v13i2.13956
- Pretty, J. (2008). Agricultural sustainability: Concepts, principles and evidence. In *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* (Vol. 363, Number 1491, pp. 447–465). Royal Society. <https://doi.org/10.1098/rstb.2007.2163>
- Purbokurniawan, K. S. H., Ilona, N. A., & Nurhani, W. (2019). ZONA PEMANFAATAN LAHAN PERTANIAN “ Igya Ser Hanjob ” DI SEKITAR DANAU ANGGI PEGUNUNGAN ARFAK , PAPUA BARAT AGRICULTURAL LAND USE ZONE “ Igya Ser Hanjob ” AROUND LAKE OF ANGGI ARFAK MOUNTAINS , WEST PAPUA. (February 2018), 473–487.
- Toansiba, M., Katmo, E. T. R., Krisnawati, K., & Wambrau, Y. L. D. (2021). Pengelolaan Tanah dalam Pengetahuan Lokal dan Praktik Pertanian Berkelanjutan pada Masyarakat Arfak, Papua Barat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 26(3), 1. <https://doi.org/10.18343/jipi.26.3.370>

- Tri Fitriani Puspitasari, Nanang Suko Sadono, Muhammad Royhan, & Suhartanto. (2025). Exploring Local Wisdom: The Role of Ethnography in Public Policy Research, A Narrative Review. *JURNAL Kebijakan Pembangunan*, 20.
- Wirata, G. (2025). Integrating Traditional Knowledge and Local Wisdom into Public Policy for Addressing Social and Ecological Crises. *Journal of Hunan University Natural Sciences*, 52(8). <https://doi.org/10.55463/issn.1674-2974.52.8.6>

